

**PERCEPATAN PENGEMBANGAN WILAYAH MELALUI STRATEGI  
IMPLEMENTASI WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)  
DAN HIRARKI KOTA-KOTA  
(Studi Kasus : Kabupaten Subang)**

**ASEP HARIYANTO**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – UNISBA  
Jalan Tamansari No.1 Bandung

**ABSTRAK**

*Percepatan pengembangan wilayah melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-kota merupakan suatu upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan hirarki kota-kota dan wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peranan yang sudah ditetapkan, sehingga memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang. Pengembangan wilayah sendiri merupakan manifestasi ruang dari pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi cenderung mengisi kawasan geografis tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan ruang (spatial inequalities) berdasarkan pendapatan, kemakmuran dan kesejahteraan material. Oleh karena itu pemerintah perlu mengintervensi secara cermat proses pengembangan wilayah tersebut melalui perencanaan wilayah yang salah satu bentuknya adalah pembagian struktur ruang wilayah berdasarkan wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota.*

**Kata Kunci :** *Strategi, Implementasi, Wilayah Pengembangan (WP), dan Hirarki Kota*

**1. PENDAHULUAN**

Dalam pembangunan daerah, pengembangan tata ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan wilayah. Pengembangan tata ruang dan pengembangan sektoral harus saling berdampingan. Kebijakan tata ruang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan pembangunan.

Penataan ruang mencakup perencanaan penataan ruang, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang). Dalam kaitan itu, perencanaan penataan ruang berkedudukan strategis karena melandasi tahap-tahap berikutnya. Oleh karenanya, perencanaan penataan ruang perlu dilaksanakan secara cermat.

Untuk mendistribusikan pembangunan di suatu wilayah, dibutuhkan pusat-pusat pengembangan wilayah sesuai dengan fungsinya di tiap bagian wilayah. Menurut Perda No.2 tahun 2004

mengenai RTRW Kabupaten Subang, wilayah Kabupaten Subang terbagi atas 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu WP Subang, WP Pamanukan, WP Jalancagak, dan WP Pabuaran. WP Subang dengan pusat Kota Subang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cibogo, Kalijati, Cipunagara, dan Cikaum. WP Pamanukan dengan pusat Kota Pamanukan meliputi Kecamatan Pamanukan, Legonkulon, Pusakanagara, Ciasem, Blanakan, Binong, dan Comprang. WP Jalancagak dengan pusat Kota Jalancagak meliputi Kecamatan Jalancagak, Sagalaherang, Cisolak, Tanjungsiang, dan Cijambe. WP Pabuaran dengan pusat Kota Cipeundeuy meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, dan Patokbeusi.

Disamping pembagian wilayah pengembangan menurut RTRW Kabupaten Subang berdasarkan fungsi hirarki kota di Kabupaten Subang di bagi menjadi 3 kelompok hirarki, yaitu :

- **Kota Hirarki I :**

Kota dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten, yang terdiri dari kota Subang, Pamanukan, Jalancagak.

- **Kota Hirarki II :**

Kota dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan beberapa Kecamatan (Sebagai pusat pertumbuhan wilayah

pengembangan) yang terdiri dari Kota Kecamatan Kalijati, Pagaden, Ciasem, Pabuaran.

- **Kota Hirarki III :**

Kota dengan fungsi sebagai pusat-pusat produksi pertanian dengan skala pelayanan lokal serta menunjang kota dengan hirarki di atasnya, yang terdiri dari kota Kecamatan Pusakanagara, Purwadadi, Cisolak, Cipunagara, Cijambe, Cikaum, Sagalaherang, Binong, Patokbeusi Comprang, Blanakan, Cipeundeuy, Tanjungsiang, Cibigo, Legonkulon.

Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota di atas menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Subang. Oleh karena itu diperlukan Strategi Implementasi untuk mewujudkan supaya pembagian wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota dapat terwujud sehingga dapat mempercepat pengembangan wilayah Kabupaten Subang.

## 2. PENGERTIAN DASAR

Percepatan pengembangan wilayah melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-kota merupakan suatu upaya untuk pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah yang memungkinkan hirarki kota-kota dan wilayah pengembangan (WP) dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peranan yang sudah ditetapkan,

sehingga memungkinkan terciptanya pola pengembangan wilayah yang lebih seimbang. Pengembangan wilayah sendiri merupakan manifestasi ruang dari pengembangan ekonomi secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi cenderung mengisi kawasan geografis tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan ruang (*spatial inequalities*) berdasarkan pendapatan, kemakmuran dan kesejahteraan material. Oleh karena itu pemerintah perlu mengintervensi secara cermat proses pengembangan wilayah tersebut melalui perencanaan wilayah yang salah satu bentuknya adalah pembagian struktur ruang wilayah berdasarkan wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota.

Wilayah pengembangan merupakan bagian-bagian wilayah yang diprioritaskan untuk dikembangkan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, sehingga diharapkan akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan yang mampu memotivasi dan membangkitkan pertumbuhan wilayah itu sendiri dan wilayah sekitarnya (*hinterland*). Sedangkan hirarki kota adalah peringkat atau tingkatan kota yang ditetapkan berdasarkan pengaruh faktor sosial dan ekonomi. Tingkatan kemandirian kota dalam kehidupan ekonomi di wilayah yang sudah mantap akan menyebabkan timbulnya hirarki kota.

Selain itu beberapa pengertian dan ketentuan yang perlu diuraikan antara lain :

1. Dalam lingkup perencanaan, tulisan ini merupakan proses untuk mencari strategi terbaik terhadap beberapa pilihan strategi implementasi wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota Kabupaten Subang;
2. Tulisan ini merupakan tahap awal yang akan menawarkan strategi-strategi pelaksanaan pembangunan pada bagian-bagian wilayah sebagai bahan penyempurnaan RTRW Kabupaten Subang;
3. Tulisan ini dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan pembangunan pada bagian-bagian wilayah yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki maupun wilayah pengembangan yang bersifat lebih teknis, sehingga fungsi dan peranan bagian-bagian wilayah tersebut dapat berjalan optimal.

### **3. TINJAUAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN TATA RUANG KABUPATEN SUBANG**

Konsep pengembangan tata ruang Kabupaten Subang secara makro pada dasarnya mengacu pada hal-hal sebagai berikut, yakni arahan Kebijakan tata ruang Propinsi Jawa Barat, kedudukan dan peran wilayah Kabupaten Subang dalam lingkup wilayah lebih luas, serta

potensi wilayah yang dapat mendukung pengembangannya.

Secara lebih rinci, dasar pertimbangan perumusan konsep pengembangan tata ruang makro wilayah yakni :

1. Terdapatnya penataan distribusi pusat pertumbuhan di Jawa Barat melalui penetapan tiga pusat pertumbuhan utama yakni Pusat Pertumbuhan Nasional (PKN) Metropolitan Jabodebek, Metropolitan Bandung dan PKN Metropolitan Cirebon. Penetapan ini mempengaruhi orientasi pemasaran ke luar (eksternal) bagi pengembangan wilayah Kabupaten Subang.
2. Upaya peningkatan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi dalam mendukung pusat pertumbuhan. Upayanya melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan jaringan KA berupa pembangunan *double track* Cikampek-Cirebon (melewati Kabupaten Subang) serta rencana pembangunan jaringan jalan tol Cikampek-Cirebon.
3. Peran Kabupaten Subang sebagai wilayah yang mengutamakan pengembangan ekonomi pada sektor agribisnis, pariwisata dan industri sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Subang.
4. Kedudukan Kabupaten Subang yang relatif dekat dengan pusat-pusat

pertumbuhan utama (Jabodetabek, Bandung, dan Cirebon) menjadi pemacu dalam meningkatkan pertumbuhan wilayah. Kondisi ini ditunjukkan dengan peran Kabupaten Subang sebagai pemasok komoditi tanaman padi, buah-buahan, perkebunan (teh dan lainnya) serta perikanan bagi wilayah Jabodetabek tersebut.

Dengan dasar pertimbangan tersebut maka dirumuskan konsep pengembangan tata ruang makro sebagai berikut :

1. Peningkatan orientasi eksternal wilayah Kabupaten Subang (Utara, Tengah, dan Selatan) dengan pusat-pusat pertumbuhan utama Jawa Barat yakni Jabodebek, Bandung, dan Cirebon. Ketiga pusat pertumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai pusat pemasaran orientasi ekspor (langsung/tidak langsung) baik komoditi pertanian (termasuk perikanan) dan industri. Peningkatan orientasi tersebut didukung dengan pembangunan jaringan jalan KA *double track* (penghubung dengan Jabodebek dan Cirebon) serta rencana pembangunan jalan tol Cikampek-Cirebon yang terutama melintasi bagian tengah wilayah kabupaten.
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi bagian Selatan kabupaten (sebagai wilayah yang lebih lambat perkembangannya) melalui

peningkatan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan di bagian Selatan, serta antar pusat pertumbuhan (Selatan, Tengah, dan Utara). Kondisi tersebut dapat memberikan dampak terhadap perkembangan dan nilai tambah kegiatan ekonomi di bagian Selatan kabupaten.

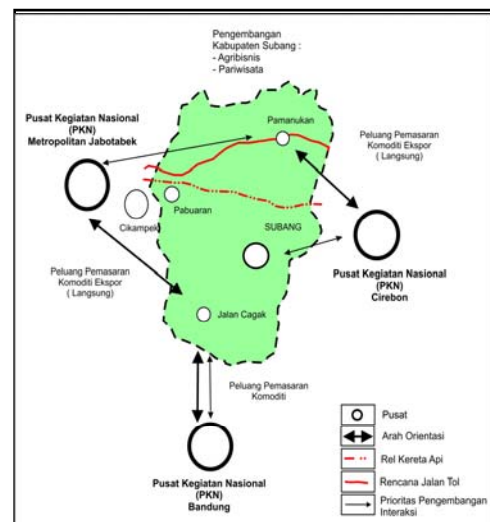
Sedangkan konsep pengembangan tata ruang mikro wilayah di Kabupaten Subang menurut RTRW Kabupaten Subang secara lebih rinci adalah :

1. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, yang mencakup pusat pertumbuhan utama dan sub pusat pertumbuhan/pelayanan.
2. Penetapan komponen pengembangan kegiatan utama, yang mencakup :
  - a. Kegiatan budidaya (Kawasan Budidaya)
  - b. Kegiatan berfungsi lindung (Kawasan Lindung).
3. Penetapan zona pengembangan, yang meliputi :
  - a. Zona pengembangan Utara dengan kegiatan utama berupa pertanian tanaman pangan (sawah), perdagangan dan jasa, pertambangan dan kawasan hutan lindung (hutan bakau). Kegiatan pertanian di zona ini berupa sawah beririgasi teknis

perlu dipertahankan keberadaannya.

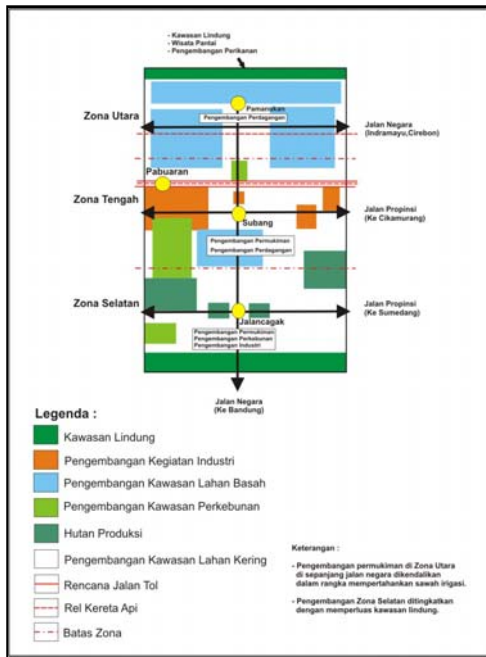
- b. Zona pengembangan Tengah dengan kegiatan utama berupa pemerintahan, permukiman, perdagangan dan jasa, industri dan pertambangan serta militer.
- c. Zona pengembangan Selatan dengan kegiatan utama berupa pariwisata, perkebunan, pertambangan, dan kawasan lindung. Pada zona ini dikembangkan pula kegiatan industri.

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep tata ruang makro dan mikro Kabupaten Subang dapat dilihat pada **Gambar 1 dan 2.**



Gambar 1 Konsep Tata Ruang Makro Kabupaten Subang

Sumber : RTRW Kabupaten Subang Tahun 2002



Gambar 2 Konsep Tata Ruang Mikro Pengembangan Kabupaten Subang  
Sumber : RTRW Kabupaten Subang Tahun 2002

#### 4. TELAAHAN TERHADAP HIRARKI KOTA-KOTA KABUPATEN SUBANG

Berdasarkan RTRW Kabupaten Subang diketahui struktur tata ruang wilayahnya. Bila dikelompokkan atas dasar fungsi dan peran dengan memperhatikan batas administrasi, maka Kabupaten Subang terbagi ke dalam 3 kelompok hirarki. Berdasarkan dokumen RTRW tersebut, diketahui pula adanya penetapan pusat pada masing-masing hirarki. Pembagian wilayah ke dalam 3 (tiga) hirarki dan penetapan pusat hirarki, merupakan usaha untuk membentuk struktur pelayanan Kabupaten Subang yang merata. Sedangkan penetapan

pusat hirarki ini secara khusus dimaksudkan agar dapat mengurangi mobilitas penduduk ke arah pusat kota, sehingga dapat mengurangi terjadinya masalah. Ruang-ruang bagian wilayah dengan pusat-pusatnya tersebut dikembangkan dalam suatu sistem transportasi ring radial. Secara umum bagian-bagian kegiatan tersebut yang terangkai dengan sistem transportasi membentuk struktur tata ruang Kabupaten Subang yang akan datang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada bahasan dibawah ini.

- **Kota Hirarki I :**

Kota dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah kabupaten, yang terdiri dari kota Subang, Pamanukan, Jalancagak.

- **Kota Hirarki II :**

Kota dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, permukiman, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan beberapa Kecamatan (Sebagai pusat pertumbuhan wilayah pengembangan) yang terdiri dari Kota Kecamatan Kalijati, Pagaden, Ciasem, Pabuaran.

- **Kota Hirarki III :**

Kota dengan fungsi sebagai pusat-pusat produksi pertanian dengan skala pelayanan lokal serta menunjang kota dengan hirarki di

atasnya, yang terdiri dari kota Kecamatan Pusakanagara, Purwadadi, Cisalak, Cipunagara, Cijambe, Cikaum, Sagalaherang, Binong, Patokbeusi Comprang, Blanakan, Cipeundeuy, Tanjungsiang, Cibigo, Legonkulon.

Jika dibandingkan dengan hasil analisis skalogram yang coba dilakukan penulis, maka dapat diketahui adanya perbedaan antara rencana hirarki kota berdasarkan RTRW dengan hasil analisis seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 1** di bawah ini.

**Tabel 1 PERBEDAAN HIRARKI HASIL SKALOGRAM DAN RTRW  
PER KECAMATAN DI KABUPATEN SUBANG**

NO	KECAMATAN	HIRARKI SKOLOGRAM	HIRARKI RTRW 2002
1	Subang	I	I
2	Pagaden	I	II
3	Cibogo	III	III
4	Cipunagara	III	III
5	Kalijati	II	II
6	Cikaum	III	III
<b>WP I</b>			
7	Pamanukan	I	I
8	Ciasem	I	II
9	LegonKulon	III	III
10	Blanakan	III	III
11	Pusakanagara	III	III
12	Binong	III	III
13	Comprang	III	III
<b>WP II</b>			
14	Jalancagak	II	I
15	Sagalaherang	III	III
16	Cisalak	III	III
17	Tanjungsiang	III	III
18	Cijambe	III	III
<b>WP III</b>			
19	Pabuaran	III	II
20	Purwadadi	III	III
21	Cipeundeuy	III	III
22	Patokbeusi	II	III
<b>WP IV</b>			

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Dilihat dari tabel perbandingan di atas, terlihat adanya perbedaan hirarki-hirarki kota sebagai berikut :

- Kecamatan-kecamatan yang menurut analisis mempunyai tingkatan hirarki yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan RTRW, yaitu Kecamatan Pagaden, Ciasem dan Patokbeusi. Kecamatan Ciasem dari semula terletak pada hirarki II setelah

dilakukan analisis kembali menggunakan analisis skalogram mengalami kenaikan ke hirarki I. Kecamatan Pagaden sama pada kecamatan Ciasem, dari semula terletak pada hirarki II setelah dilakukan analisis kembali menggunakan analisis mengalami kenaikan ke hirarki I. Kecamatan Patokbeusi sama dengan kecamatan

Ciasem dan Pagaden dari semula terletak pada hirarki III setelah dilakukan analisis kembali menggunakan analisis skalogram mengalami kenaikan ke hirarki II.

- Kecamatan-kecamatan yang menurut hasil analisis mempunyai hirarki yang lebih rendah jika dibandingkan RTRW, yaitu Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Pabuaran. Kecamatan Jalancagak dari semula terletak pada hirarki I setelah dilakukan analisis kembali menggunakan analisis skalogram mengalami penurunan ke Hirarki II. Kecamatan Pabuaran sama dengan kecamatan Jalancagak dari semula terletak pada hirarki II setelah dilakukan analisis kembali menggunakan analisis skalogram mengalami penurunan ke Hirarki III. Kecamatan Jalancagak dan Kecamatan Pabuaran adalah kecamatan yang menjadi Pusat WP, oleh karena itu perlu ditingkatkan pembangunan fasilitas untuk mendukung keberadaan kecamatan-kecamatan tersebut sebagai pusat WP. Lebih khusus lagi adalah Kecamatan Pabuaran karena kecamatan Patokbeusi yang merupakan bagian dari WP Pabuaran menurut hasil analisis mempunyai hirarki yang lebih tinggi dari Kecamatan Pabuaran.

Dari pembagian hirarki tersebut diatas dan dengan melihat kondisi

sebenarnya yang berkembang dilapangan, maka dapat dilakukan suatu tinjauan terhadap rencana struktur tata ruang Kabupaten Subang dengan melihat bagaimana kesesuaian pelaksanaan konsep yang telah disusun dengan kenyataan dilapangan.

Dilihat dari perkembangan yang terjadi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa tampaknya rencana pengembangan konsep hirarki ini belum tercapai secara optimal. Memang jika dilihat secara sepintas terkesan bahwa adanya pembagian fungsi wilayah seperti tersebut diatas, namun secara kualitas tidak adanya penetapan fungsi yang jelas antar hirarki menimbulkan / menyebabkan terjadinya pencampuran antara kegiatan atau fungsi, sehingga menimbulkan kesan pencampuran (*mixuse*). Selain itu tidak optimalnya pembagian hirarki terlihat dari banyaknya fungsi-fungsi yang ditetapkan untuk masing-masing hirarki belum dapat diimplementasikan secara nyata. Bahkan yang terjadi sebaliknya, banyak kegiatan-kegiatan yang berkembang yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Pembagian hirarki ini sebenarnya dimaksudkan agar pembangunan dapat terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah, namun kenyataannya pembangunan yang terjadi masih terkonsentrasi dipusat kota dan disepanjang jalan utama. Dengan demikian tujuan pembagian wilayah



menurut hirarki yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya permasalahan khususnya di pusat kota dan mengurangi ketimpangan antar wilayah tidak tercapai. Ketidak tercapaiannya konsep ini disebabkan tidak adanya batasan yang jelas antara fungsi masing-masing hirarki tersebut, disamping penyebaran fasilitas yang dapat mendukung berjalan fungsi hirarki tidak merata dan tidak terdistribusi pada semua bagian wilayah sebagai contoh : terlihat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah Kabupaten Subang Bagian Utara dengan Wilayah Bagian Selatan. Tidak berkembangnya fungsi masing-masing hirarki tersebut dapat pula terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

1. Penetapan fungsi untuk masing-masing hirarki tidak didasarkan kepada potensi atau karakteristik masing-masing hirarki kota;
2. Penetapan fungsi tidak didukung oleh penyediaan infrastruktur yang dapat mempermudah perkembangan fungsi tersebut;
3. Penetapan fungsi tidak didasarkan kepada keinginan atau aspirasi masyarakat dan pelaku usaha;
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah dibuat;
5. Kurangnya keberanian dan ketegasan pemerintah daerah untuk

mengeimplementasikan rencana yang sudah dibuat;

6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap fungsi ruang yang sudah ditetapkan;
7. Pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral, serta belum adanya kesepakatan dari masing-masing pelaku pembangunan di daerah mengenai RTRW Kabupaten Subang yang sudah dibuat.

## **5. TELAAHAN TERHADAP WILAYAH PENGEMBANGAN (WP)**

Pola tata ruang Kabupaten Subang yang telah terbentuk nampaknya masih sangat terkonsentrasi pada kegiatan yang terletak di Pusat Kota, masih menganut pola sistem "linier" dan "konsentrik". Untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan transportasi, secara garis besar usaha yang dapat diambil mengatasi sistem konsentrik adalah dengan mendesentralisasikan kegiatan pusat pelayanan lingkungan ke bagian-bagian wilayah yang dianggap cukup tinggi aksesibilitasnya dan mempunyai potensi mengembangkan fungsi tertentu, dalam hal ini konsep yang dianut adalah konsep "intergrated fuction". Dalam kasus pengembangan wilayah, maka pusat-pusat kegiatan / pelayanan harus dibentuk dengan dua dasar pemikiran.

**Pertama** : Pembentukan pusat pelayanan merupakan daya tarik berkembangnya kawasan lebih cepat.

**Kedua** : Pembentukan pusat pelayanan dalam konteks pengembangan wilayah secara keseluruhan akan mengurangi beban pusat kota dan dengan demikian otomatis akan membagi beban pelayanan jalan utama yang menuju ke pusat kegiatan utama.

Pembentukan pusat kegiatan yang mempunyai skala local / lingkungan dapat dilakukan dengan merencanakan pengelompokan fasilitas pelayanan seperti fasilitas perdagangan/perbelanjaan, industri, kesehatan, pendidikan, jasa/pemerintahan, taman atau tempat rekreasi.

Pusat kegiatan tersebut mempunyai jangkauan pelayanan sendiri-sendiri dengan orientasi kegiatan secara teoritis sebagai berikut : Bila kegiatan yang akan dialokasikan diatas dihubungkan dengan sistem jaringan jalan, maka membentuk struktur ruang wilayah. Sistem jaringan jalan yang harus direncanakan adalah sistem radial.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Subang diketahui struktur tata ruang wilayahnya. Bila dikelompokkan atas dasar fungsi dan dengan memperhatikan batas administrasi, maka Kabupaten Subang terbagi ke dalam 4 WP (Wilayah Pengembangan). Berdasarkan dokumen RTRW tersebut, diketahui pula adanya penetapan pusat-pusat sekunder selain pusat kota. Pembagian wilayah ke dalam 4 (empat) WP dan penetapan pusat sekunder, merupakan usaha untuk membentuk struktur pelayanan Kabupaten Subang yang merata. Sedangkan penetapan pusat sekunder ini secara khusus dimaksudkan agar dapat mengurangi mobilitas penduduk ke arah pusat kota, sehingga dapat mengurangi terjadinya masalah di pusat kota. Ruang-ruang wilayah pengembangan dengan pusat-pusatnya tersebut dikembangkan dalam suatu sistem transportasi ring radial. Secara umum WP tersebut yang terangkai dengan sistem transportasi membentuk struktur tata ruang Kabupaten Subang yang akan datang.

Berdasarkan rencana struktur ruang pada RTRW Kabupaten Subang, bahwa Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Subang dibagi atas 4 (empat) wilayah pengembangan (WP), yaitu :

#### **Wilayah Pengembangan I Subang**

Kota Subang : Pusat pertumbuhan utama, pusat pemerintahan, pusat pelayanan skala kabupaten dan perdagangan interregional.

- Kota Pagaden : Pusat perhubungan darat (kereta api), pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, industri dan kebutuhan pokok.
- Kota Cibogo : Pusat produksi pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri.
- Kota Cipunagara : Pusat produksi pertanian dan perkebunan, pusat kegiatan industri.
- Kota Kalijati : Pusat perhubungan antar kota, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, pusat kegiatan industri, dan pelayanan kebutuhan pokok.
- Kota Cikaum : Pusat produksi pertanian.

WP ini berlokasi dibagian tengah Kabupaten Subang, yang meliputi wilayah Kecamatan Subang, Pagaden, Cipunagara, Cibogo, Kalijati dan Cikaum yang sekaligus merupakan wilayah pusat Kabupaten Subang. Luas WP I (pusat kota) adalah sekitar 51.747 Ha.

WP ini mempunyai akses paling tinggi dibanding WP lainnya, karena dilalui rute transportasi Kereta Api dan Jalan Raya yang menghubungkan antara Kabupaten Subang dengan Cirebon dan Jakarta.

Dalam RTRW Kabupaten Subang tersebut dijelaskan fungsi WP ini sebagai pusat pertumbuhan utama Kabupaten Subang yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pusat pelayanan primer (pusat perdagangan dan jasa, pemerintahan dan perkantoran, RSUD, stasiun KA, terminal angkutan, industri, pusat koleksi distribusi produksi pertanian, dan pusat pendidikan), pelayanan sekunder dan tersier. Disamping itu direncanakan pula pusat pelayanan sosial.

#### **Wilayah Pengembangan II Pamanukan**

- Kota Pamanukan : Pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan WP II, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, perikanan, dan kebutuhan pokok.
- Kota Ciasem : Pusat perhubungan antar kota, pusat produksi pertanian dan perikanan laut, dan pusat kegiatan industri perikanan.
- Kota Legonkulon : Pusat produksi pertanian (padi) dan perikanan laut
- Kota Blanakan : Pusat produksi pertanian (padi) dan perikanan laut
- Kota Pusanagara : Pusat produksi pertanian (padi)
- Kota Binong : Pusat produksi pertanian (padi)
- Kota Comprang : Pusat produksi pertanian (padi)

WP ini berlokasi dibagian Utara Kabupaten Subang, yang meliputi wilayah Kecamatan Pamanukan, Ciasem, Legon kulon, Blanakan, Pusanagara, Binong dan Comprang

yang sekaligus merupakan wilayah pesisir (dataran rendah) Kabupaten Subang.

Merupakan WP terbesar di Kabupaten Subang dengan luas sekitar

65.931 Ha, Fungsi utama dari WP ini menurut RTRW Kabupaten Subang adalah sebagai kawasan pendukung pusat kota (WP I) dengan kegiatan sekunder wilayah dengan dominasi kegiatan permukiman kepadatan sedang

dan rendah, pusat pertumbuhan, pusat pelayanan sosial, pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perikanan, pusat perhubungan dan industri pengolahan hasil laut.

### **Wilayah Pengembangan III Jalancagak**

- Kota Jalancagak : Pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan WP III, pusat koleksi distribusi hasil pertanian, pusat perhubungan antar kota, pusat pengembangan pariwisata dan pengembangan industri
- Kota Sagalaherang : Pusat produksi pertanian dan perkebunan, dan pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam.
- Kota Cisalak : Pusat produksi pertanian dan perkebunan, dan pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam.
- Kota Tanjungsiang : Pusat produksi pertanian dan perkebunan, dan pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam.
- Kota Cijambe : Pusat produksi pertanian dan perkebunan.

WP ini berlokasi di bagian selatan Kabupaten Subang, yang sekaligus merupakan wilayah pegunungan (dataran tinggi) Kabupaten Subang.

Secara administrasi WP III terdapat di Kecamatan Jalan Cagak, Sagalaherang, Cisalak, Tanjungsiang, dan Cijambe dengan luas sekitar 49.904 Ha. Fungsi utama WP ini adalah sebagai kawasan pendukung pusat kota (WP I) dengan

dominasi kegiatan sekunder / tersier berupa permukiman kepadatan rendah, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan umum, pusat koleksi dan distribusi, pusat perhubungan, pengembangan pariwisata, pengembangan industri, sentra agrobisnis / sentra sayur dan buah-buahan, pelayanan umum lingkungan serta kawasan hutan lindung.

### **Wilayah Pengembangan IV Pabuaran**

- Kota Pabuaran : Pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan WP IV, pusat produksi hasil pertanian, dan pusat kegiatan industri.
- Kota Purwadadi : Pusat produksi hasil pertanian dan pusat kegiatan industri.
- Kota Cipeundeuy : Pusat kegiatan industri.
- Kota Patokbeusi : Pusat produksi pertanian padi dan pengembangan kegiatan industri.

WP ini berlokasi dibagian Barat Kabupaten Subang, yang sekaligus merupakan wilayah dataran Kabupaten Subang.

Secara administrasi WP IV terdapat di Kecamatan Pabuaran, Purwadadi, Cipeundeuy, dan Patokbeusi dengan luas 37.624 Ha. Fungsi utama WP ini adalah sebagai pendukung kegiatan pusat kota (WP I) yang didalamnya terdapat kawasan pelayanan sekunder dan tersier, kawasan perumahan, fasilitas pelayanan sosial, pusat produksi hasil pertanian, dan pusat industri.

Dari pembagian WP tersebut diatas dan dengan melihat kondisi sebenarnya yang berkembang dilapangan, maka dapat dilakukan suatu review terhadap rencana struktur tata ruang Kabupaten Subang dengan melihat bagaimana kesesuaian pelaksanaan konsep yang telah disusun dengan kenyataan dilapangan

Dilihat dari perkembangan yang terjadi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa tampaknya rencana pengembangan konsep WP ini belum tercapai secara optimal. Memang jika dilihat secara sepintas terkesan bahwa adanya pembagian fungsi wilayah seperti tersebut diatas, namun secara kualitas tidak adanya penetapan fungsi yang jelas antar WP menimbulkan / menyebabkan terjadinya pencampuran antara kegiatan atau fungsi, sehingga menimbulkan

kesan pencampuran. Selain itu tidak optimalnya pembagian WP terlihat dari banyaknya fungsi-fungsi yang sama yang ditetapkan untuk masing-masing WP belum dapat diimplementasikan secara nyata. Bahkan yang terjadi sebaliknya, banyak kegiatan-kegiatan yang berkembang yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.

Berikut ini uraian perbandingan antara konsep dan kondisi eksisting berdasarkan WP.

- **WP I**, arahan yang terdapat dalam RTRW menyebutkan bahwa WP ini difungsikan sebagai pusat pertumbuhan utama Kabupaten Subang yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pusat pelayanan primer (pusat perdagangan dan jasa, pemerintahan dan perkantoran, RSU, stasiun KA, terminal angkutan, industri, pusat koleksi distribusi produksi pertanian, dan pusat pendidikan), pelayanan sekunder dan tersier. Disamping itu direncanakan pula pusat pelayanan sosial. Namun pada kenyataannya fungsi-fungsi tersebut masih belum berjalan secara optimal dan pengembangan fungsi tersebut masih tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Subang. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi eksisting relatif belum sesuai dengan arahan yang ada.

- **WP II**, difungsikan sebagai kawasan pendukung pusat kota (WP I) dengan kegiatan sekunder wilayah dengan dominasi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan rendah, pusat pertumbuhan, pusat pelayanan sosial, pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perikanan, pusat perhubungan dan industri pengolahan hasil laut. Penetapan WP INI sebagaimana fungsi tersebut belum tercapai. Hal ini terlihat dari masih kecilnya prosentase penggunaan lahan yang berkembang saat ini untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu sarana pendukung fungsi tersebut masih belum berkembang, sehingga implementasi fungsi tersebut tidak optimal. Yang harus menjadi perhatian adalah penetapan fungsi pertanian secara tegas di WP ini, sebab selain di WP II, fungsi pertanian juga hampir diemban oleh semua WP. Oleh karena itu perlu adanya penegasan yang jelas mengenai fungsi pertanian ini (jenis pertanian yang akan dikembangkan).
- **WP III**, ditetapkan fungsinya sebagai kawasan pendukung pusat kota (WP I) dengan dominasi kegiatan sekunder / tersier berupa permukiman kepadatan rendah, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan umum, pusat koleksi dan distribusi, pusat perhubungan, pengembangan pariwisata, pengembangan industri, sentra agrobisnis / sentra sayur dan buah-buahan, pelayanan umum lingkungan serta kawasan hutan lindung. Fungsi-fungsi WP ini relatif sudah berjalan karena jika melihat kondisi dilapangan fungsi-fungsi tersebut sudah mulai berkembang. Ada hal penting yang kurang ditegaskan dalam fungsi WP ini yaitu fungsi lindung, padahal WP ini merupakan daerah pegunungan yang memiliki fungsi lindung sebagai daerah resapan air. Oleh karena itu perlu adanya penegasan secara lebih detail mengenai fungsi ini.
- **WP IV**, ditetapkan fungsinya sebagai pendukung kegiatan pusat kota (WP I) yang didalamnya terdapat kawasan pelayanan sekunder dan tersier, kawasan perumahan, fasilitas pelayanan sosial, pusat produksi hasil pertanian, dan pusat industri. Fungsi-fungsi WP ini relatif sudah berjalan karena jika melihat kondisi dilapangan fungsi-fungsi tersebut sudah sesuai, namun karena fungsi-fungsi yang ditetapkan merupakan kegiatan dengan kepadatan rendah, maka kawasan ini relatif kurang berkembang sehingga kegiatan masih terkonsentrasi di pusat Kota (WP I),. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya beberapa kegiatan yang tidak ditetapkan di WP ini. Selain itu adanya rencana pembangunan Jalan Tol Cikampek

perlu mendapatkan perhatian dan kecermatan dalam penyusunan strategi implementasi khususnya dalam menetapkan fungsi wilayah ini.

Pembagian WP ini sebenarnya dimaksudkan agar pembangunan Wilayah dapat terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah, namun kenyataannya pembangunan yang terjadi masih terkonsentrasi dipusat kota dan disepanjang jalan utama. Dengan demikian tujuan pembagian wilayah menurut WP yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya permasalahan kota khususnya di pusat kota tidak tercapai. Ketidak tercapaiannya konsep WP ini disebabkan karena pembagian wilayah menurut WP tidak dibarengi dengan pengembangan infrastruktur secara merata khususnya infrastruktur pendukung fungsi-fungsi tersebut, selain itu penetapan fungsi tersebut dirasakan masih kurang jelas sehingga investasi yang dilakukan seringkali tidak memperhatikan fungsi tersebut, tidak adanya batasan yang jelas antara fungsi masing-masing WP tersebut, disamping penyebaran fasilitas yang dapat mendukung berjalanan fungsi BWK tidak merata dan tidak terdistribusi.

## **6. STRATEGI IMPLEMENTASI**

Kabupaten Subang telah memiliki RTRW yang telah di-Perdakan pada tahun 2004, yaitu Perda No.2 Tahun 2004. Tapi nampaknya rencana tata

ruang tersebut belum efektif untuk mengarahkan pembangunan ruang wilayah Kabupaten. Ketidakefektifan ini disebabkan karena rencana tata ruang Kabupaten Subang tersebut lebih banyak bersifat pengendalian, tanpa sifat promotif yang menonjol, dalam arti kurang dapat mendorong pengisian yang ditata tersebut. Selain itu, rencana-rencana yang lebih bersifat promotif seperti Renstra, lebih condong mengarah kepada pembangunan sosial ekonomi, sehingga pada prakteknya seringkali tidak terkoordinasikan dengan RTRW Kabupaten Subang. Semestinya RTRW yang dibuat harus bersifat dinamis, artinya harus mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan semakin kuatnya peranan sektor swasta dan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Oleh karena itu, agar RTRW Kabupaten Subang tersebut dapat berfungsi secara optimal, maka perlu dibuat suatu rencana yang lebih bersifat strategis sebagai alat untuk mempermudah implementasi RTRW tersebut.

Kebijakan ruang yang telah disusun dalam RTRW Kabupaten Subang masih berorientasi pada pembangunan infrastruktur saja, sedangkan untuk mengantisipasi perkembangan pada masa datang, perlu disusun kebijakan yang lebih terpadu, baik antar bagian wilayah, sektor, maupun antara pelaku pembangunan. Untuk itu, perlu disusun kebijakan

yang lingkupnya lebih luas, sehingga perlu disusun Urban Policy Action Plan (UPAP) yang didasarkan kepada :

1. Sistem kota-kota;
2. Pembangunan yang terpadu;
3. Pembangunan berwawasan lingkungan;
4. Peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Sebagai bahan pertimbangan awal mengenai penyusunan Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-kota Kabupaten Subang, diupayakan untuk menyusun strategi implementasi yang dikenal dengan Urban Development Strategy (UDS). Ada beberapa pertimbangan yang menjadi landasan utama penyusunan strategi tersebut, yaitu :

1. *Sistem kota-kota*; melihat hirarki dari kota-kota yang ada, tingkat pelayanannya, serta melihat keterkaitan antar kota. Pengertian kota, dapat dilihat dari :
  - *Wilayah perkotaan fungsional*: pengertian wilayah perkotaan tidak hanya merupakan wilayah yang berada di dalam satu batas administratif, melainkan juga meliputi daerah di sekitar kota tersebut yang sudah memiliki ciri perkotaan serta memiliki hubungan yang kuat dengan kota tersebut.
  - *Wilayah perkotaan administratif* : pengertian wilayah perkotaan

meliputi wilayah yang berada di dalam batas administrasi kota.

2. Perlunya keterpaduan dalam pembangunan kota-kota ; keterpaduan pembangunan ini tidak hanya keterpaduan antar sektor, melainkan juga keterpaduan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
3. Fungsi atau peran kota-kota dalam pembangunan wilayah ; dalam hal ini, fungsi atau peran kota-kota dalam wilayah akan menentukan pusat-pusat pertumbuhan wilayah serta prioritas dari pembangunan wilayah.

Dilihat dari perkembangan yang terjadi dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa tampaknya rencana pengembangan konsep hirarki ini belum tercapai secara optimal. Memang jika dilihat secara sepintas terkesan bahwa adanya pembagian fungsi wilayah seperti tersebut diatas, namun secara kualitas tidak adanya penetapan fungsi yang jelas antar hirarki menimbulkan / menyebabkan terjadinya pencampuran antara kegiatan atau fungsi, sehingga menimbulkan kesan pencampuran (*mixuse*). Selain itu tidak optimalnya pembagian hirarki terlihat dari banyaknya fungsi-fungsi yang ditetapkan untuk masing-masing hirarki belum dapat diimplementasikan secara nyata. Bahkan yang terjadi sebaliknya, banyak kegiatan-kegiatan yang berkembang yang tidak sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.



Pembagian hirarki ini sebenarnya dimaksudkan agar pembangunan dapat terdistribusi secara merata ke seluruh wilayah, namun kenyataannya pembangunan yang terjadi masih terkonsentrasi dipusat kota dan disepanjang jalan utama. Dengan demikian tujuan pembagian wilayah menurut hirarki yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya permasalahan khususnya di pusat kota dan mengurangi ketimpangan antar wilayah tidak tercapai. Ketidak tercapaiannya konsep ini disebabkan tidak adanya batasan yang jelas antara fungsi masing-masing hirarki tersebut, disamping penyebaran fasilitas yang dapat mendukung berjalannya fungsi hirarki tidak merata dan tidak terdistribusi pada semua bagian wilayah sebagai contoh : terlihat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah Kabupaten Subang Bagian Utara dengan Wilayah Bagian Selatan.

Tidak berkembangnya fungsi masing-masing hirarki tersebut dapat pula terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

1. Penetapan fungsi untuk masing-masing hirarki tidak didasarkan kepada potensi atau karakteristik masing-masing hirarki kota;
2. Penetapan fungsi tidak didukung oleh penyediaan infrastruktur yang dapat mempermudah perkembangan fungsi tersebut;
3. Penetapan fungsi tidak didasarkan kepada keinginan atau aspirasi masyarakat dan pelaku usaha;
4. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah dibuat;
5. Kurangnya keberanian dan ketegasan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat;
6. Kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap fungsi ruang yang sudah ditetapkan;
7. Pembangunan yang dilakukan masih bersifat sektoral, serta belum adanya kesepahaman dari masing-masing pelaku pembangunan di daerah mengenai RTRW Kabupaten Subang yang sudah dibuat.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan konsep dari UDS (urban development strategi), maka untuk mencapai struktur ruang yang diharapkan, perlu disusun tindak lanjut bagi implementasi wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota di Kabupaten Subang, yang terdiri dari :

1. Tindak operasionalisasi UDS melalui Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT).
2. Tindak pengembangan kelembagaan melalui Institute of Urban Policy Analysis yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan

(TKPP). TKPP ini harus mengeluarkan kebijaksanaan pembangunan dengan titik berat antara lain :

- Pembangunan prasarana terpadu;
- Desentralisasi pembangunan infrastruktur;
- koordinasi antar instansi untuk pembangunan prasarana terpadu.

Adapun strategi yang perlu dilakukan dalam implementasi wilayah pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota, berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, antara lain :

1. Pembangunan perumahan dan permukiman harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hunian, lingkungan kehidupan, pertumbuhan wilayah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengembangan perdesaan dan perkotaan, memperluas lapangan kerja, serta menggerakkan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Subang.
2. Pembangiunan Kabupaten Subang harus diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar bagian wilayah, antar daerah perkotaan dan daerah perdesaan serta membuka daerah terisolasi dan mempercepat pernbangunan Kabupaten Subang

bagian utara, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi yang dimiliki.

3. Peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan dengan tetap mengacu kepada arah dan tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Subang.

Strategi yang dikemukakan di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam bentuk program-program pembangunan. Akan tetapi sebelum sampai kepada uraian tersebut, akan dikemukakan terlebih dahulu beberapa strategi yang bersifat umum dalam kaitan dengan perkembangan Kabupaten Subang yang mendasari penetapan program-program tersebut.

### **6.1 Permasalahan Dan Upaya Mengatasi Permasalahan Di Kabupaten Subang**

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka dapat disimpulkan ada beberapa hal yang berkaitan dengan Strategi umum dalam kaitan dengan perkembangan Kabupaten Subang :

1. Kabupaten Subang telah berkembang relatif pesat, terutama dalam dekade terakhir. Jumlah penduduk meningkat dengan laju 1,11 % per tahun pada kurun waktu 2001-2004, untuk itu perlu adanya peningkatan infrastruktur dan

- pelayanan umum guna mengantisipasi penambahan penduduk tersebut.
2. Kondisi perkembangan Kabupaten Subang dicirikan oleh adanya ketidakseimbangan penyebaran penduduk maupun aktivitas. Untuk itu perlu adanya upaya pendistribusian penduduk dan aktivitas ekonomi.
  3. Adanya ketimpangan pembangunan bagian wilayah, dimana kota-kota yang relatif dekat dengan pusat pertumbuhan relatif lebih maju. Untuk itu, usaha-usaha yang dapat memacu perkembangan kota-kota yang kurang berkembang perlu lebih digalakkan baik melalui peningkatan investasi sarana, prasarana maupun pelayanan; serta peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
  4. Pembangunan wilayah perkotaan Kabupaten Subang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan wilayah perdesaan Kabupaten Subang. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembangunan yang berlokasi di wilayah perkotaan harus mampu memberikan dampak yang besar bagi pengembangan wilayah perdesaan.
  5. Peluang untuk terus meningkatkan kegiatan di bidang ekonomi maupun sosial, perlu memperhatikan dampak negatif, terutama jika peningkatan kegiatan tersebut tidak mampu merangsang perkembangan wilayah perdesaan, menjadi bagian dari sistem kota-kota Kabupaten Subang berarti pula bahwa kota-kota di Kabupaten Subang harus mampu bersaing secara kompetitif dengan kota-kota di wilayah lainnya lain baik untuk investasi maupun sebagai tempat tinggal yang nyaman dan aman.
  6. Ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana di Kabupaten Subang masih sangat terbatas dan belum secara merata dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlu upaya-upaya peningkatan dan pendistribusiannya secara lebih merata.
  7. Kemampuan pemerintah Kabupaten Subang dalam manajemen maupun pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Subang yang terus meningkat masih sangat terbatas. Sehingga perlu adanya upaya peningkatan manajemen dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Subang.
  8. Peraturan yang mengatur kegiatan pembangunan di Kabupaten Subang, masih belum dapat mengikuti dinamika perkembangan wilayah. Perlu adanya peraturan yang lebih bersifat dinamis dan operasional sehingga mampu mengantisipasi dinamika perubahan.

9. Di sisi lain, perkembangan Kabupaten Subang juga dicirikan oleh semakin berperannya masyarakat dan dunia usaha dalam mengarahkan kegiatan pembangunan, sehingga dinamika perubahan pembangunan begitu cepat. Untuk itu perlu adanya upaya mensinergikan antara pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan pembangunan yang dilakukan swasta dan masyarakat.
10. Pemanfaatan sumber daya alam cenderung diakukan tanpa rencana dan kurang hati-hati sehingga dapat mengancam kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, untuk itu perlu adanya upaya pengendalian dalam pemanfaatan SDA.

## **6.2 Strategi Pembangunan di Kabupaten Subang**

Sasaran pengembangan Wilayah Pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota di Kabupaten Subang adalah:

1. Terwujudnya keserasian dan keseimbangan pembangunan antara desa-kota, antar desa, dan antar kota;
2. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera secara merata;
3. Teratasinya masalah kemiskinan di Kabupaten Subang;
4. Terwujudnya lingkungan yang sehat serta lestari

Untuk mencapai sasaran pengembangan WP dan hirarki tersebut,

maka pembangunan Kabupaten Subang harus diarahkan kepada:

1. Menyelenggarakan pengelolaan pembangunan yang lebih tertib dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya alamnya, mengacu pada rencana tata ruang, termasuk pengelolaan administrasi pertanahan yang lebih tertib dan adil, dan ditunjang oleh kelembagaan pemerintah yang makin siap melaksanakan otonomi daerah
2. Memantapkan kemitraan pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan, baik melalui organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya, maupun pengusaha perseorangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan kualitas hidup penduduk yang makin merata
4. Mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Subang
5. Meningkatkan kualitas fisik lingkungan sesuai baku mutu lingkungan

Selanjutnya untuk pencapaian sasaran tersebut, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan memantapkan sistem WP dan hirarki kota-kota, yang meliputi upaya-upaya :
  - Menyelenggarakan pembangunan Kabupaten

- Subang dengan mempertimbangkan peranan dan fungsi masing-masing hirarki kota dan wilayah pengembangan (WP) dalam kaitannya dengan pengembangan potensi ekonomi berupa sektor-sektor dan wilayah-wilayah yang strategis
- Mendukung penyebaran kegiatan ekonomi pada masing-masing WP dan hirarki kota sekaligus sebagai penyangga aglomerasi pertumbuhan ekonomi di Pusat Kota.
  - Mendorong pengembangan kota baru yaitu kota yang kurang maju menjadi kota maju melalui pengembangan kegiatan ekonomi dan infrastruktur.
  - Mengarahkan perkembangan kota-kota dengan pemberian insentif yang menarik bagi kota-kota yang tertinggal.
  - Penyederhanaan prosedur investasi
  - Peningkatan pelayanan prasarana pendukung ekonomi
2. Meningkatkan kemampuan dan produktivitas bagian-bagian wilayah, dengan cara :
- Mengembangkan kemampuan pemerintah daerah, untuk melaksanakan investasi pembangunan secara mandiri.
  - Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana di masing-masing bagian wilayah yang terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
- Merangsang perkembangan investasi sektor ekonomi yang merupakan sektor andalan melalui pembentukan sentra produksi serta penyediaan sarana dan prasarana angkutan guna peningkatan aksesibilitas pada masing-masing bagian wilayah.
  - Memanfaatkan ruang dan potensi bagian wilayah tersebut secara efisien.
3. Meningkatkan kemampuan SDM, melalui pemantapan pengembangan SDM dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama pendidikan kejuruan dan ketrampilan; mengembangkan penyuluhan yang efektif khususnya untuk meningkatkan kesadaran, kedisiplinan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah; serta meningkatkan kualitas aparat Pemerintah Daerah melalui pelatihan sejalan dengan pengembangan jabatan dan kebutuhan Pemerintah yang bersangkutan.
4. Memantapkan kelembagaan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu:
- Menyempurnakan kelembagaan pemerintah daerah melalui

- peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan daerah disesuaikan dengan kondisi dan tipologi Kabupaten Subang.
- Memantapkan kapasitas keuangan pemerintah daerah terutama dengan penekanan pada peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi penggunaannya, penggunaan dana masyarakat, dunia usaha, dan pinjaman daerah.
  - Menyempurnakan mekanisme hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, terutama mekanisme pinjaman daerah dan bantuan dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan pemerintah daerah dan BUMD
5. Melembagakan pengelolaan pembangunan yang terencana dan terpadu, meliputi upaya :
- Menyelenggarakan pembangunan secara terpadu antar sektor bagi bagian wilayah yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang, bagian wilayah dengan permasalahan khusus; bagian wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi, kota-kota baru, serta bagian wilayah yang besar dan berkembang pesat.
  - menyelenggarakan pembangunan secara sektoral untuk kota-kota atau bagian wilayah yang tidak terlalu rumit permasalahannya dan perlu dipacu pemenuhan kebutuhan dasar penduduknya terutama golongan berpenghasilan rendah.
  - memantapkan dan melembagakan penyusunan program pembangunan jangka menengah dalam kerangka mekanisme perencanaan pembangunan WP dan hirarki kota-kota.
  - mengembangkan dan melembagakan fungsi koordinasi di semua tingkatan pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta pembiayaannya.
6. Memantapkan perangkat peraturan pendukung pembangunan; di mana peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pembangunan pada WP dan hirarki kota-kota tersebut dilengkapi dan dimantapkan sesuai dengan fungsi, kondisi dan tipologi guna memperlancar pelaksanaan pembangunan, menmeratakan hasil-hasilnya, dan mengendalikan dampak negatif pembangunan
7. Meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial ekonomi pada masing-masing WP dan hirarki kota, yang mencakup :
- Menetapkan dan menerapkan baku mutu lingkungan;

- Menetapkan dan memasyarakatkan peraturan pengendalian pembangunan di masing-masing WP dan hirarki kota dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungannya;
- Melembagakan pembangunan WP dan hirarki kota yang mengacu pada rencana tata ruang yang berkualitas dan operasional;
- Mengendalikan peruntukan lahan yang sesuai dengan daya dukung lingkungan melalui tertib administrasi pertanahan;
- Memantapkan keamanan dan kesejahteraan lingkungan di masing-masing WP dan hirarki kota melalui pengurangan kesenjangan dan konflik sosial.

Adapun untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut, ditetapkan program-program pembangunan pada masing-masing WP dan hirarki kota sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi WP dan hirarki kota, yang dilaksanakan melalui :
  - Pengidentifikasian dan pemantapan sistem WP dan kota-kota di Kabupaten Subang yang telah dijabarkan dalam tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang;
  - Penataan WP dan hirarki kota-kota terutama bagi bagian wilayah dan kota-kota yang mempunyai fungsi menunjang kegiatan ekonomi wilayah Kabupaten Subang (industri, pertanian, dsb);
2. Program pembangunan prasarana dan sarana, yang meliputi :
  - Penataan WP dan kota-kota yang ada disekitar pusat untuk berfungsi sebagai penyangga;
  - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat disesuaikan dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing WP dan hirarki kota

- Pembangunan prasarana penyehatan lingkungan permukiman seperti jaringan pematusan, pengolahan limbah, dan persampahan
  - Pengembangan dan perbaikan fasilitas perumahan termasuk pengembangan kawasan perumahan berskala besar dan pembangunan kota baru;
3. Program pengembangan ekonomi, yang meliputi :
- Pemantapan ketersediaan fasilitas pasar, sentra produksi dan fasilitas perdagangan lainnya termasuk kemudahan prosedur dan perizinan bagi kegiatan usaha masyarakat khususnya bagi wilayah yang kurang berkembang;
  - Pemantapan lembaga perekonomian sekaligus peningkatan kemudahan pencapaian fasilitas keuangan guna menunjang kegiatan usaha masyarakat;
  - Pembinaan pengusaha skala menengah, kecil, dan tradisional termasuk koperasi disertai dengan pemantapan pola hubungan perdagangan yang saling menunjang;
  - Perluasan kesempatan kerja terutama bagi tenaga kerja setempat
4. Program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, yang meliputi :
- Pendidikan formal kejuruan dan keterampilan bagi aparat pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah;
  - Pelatihan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan daerah sesuai dengan pengembangan jabatan dan kebutuhan pemerintah yang bersangkutan;
  - Penyuluhan yang terencana dalam meningkatkan kedisiplinan serta mengembangkan kehidupan yang lebih tertib dan sadar hukum.
5. Program peningkatan peran serta masyarakat, yang mencakup :
- Peningkatan keterampilan dan pengetahuan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga dapat memasuki pasar tenaga kerja dan atau berwiraswasta;
  - Penyuluhan yang efektif dalam mengerahkan partisipasi masyarakat;
  - Pengembangan sistem kelembagaan yang memberikan iklim keterbukaan dalam pembangunan.
6. Program pemantapan keuangan daerah, yang meliputi :
- Penyempurnaan dan perbaikan sistem bantuan kepada pemerintah kota berdasarkan kebutuhan pembangunan di



- daerah dan potensi sumber dana lokal serta kemampuannya untuk meminjam;
  - Peningkatan pendapatan daerah untuk kepentingan pembangunan daerah;
  - Penyempurnaan dan penyederhanaan mekanisme pinjaman untuk pembiayaan pembangunan;
  - Mobilisasi tabungan masyarakat setempat dan dunia usaha.
7. Program kelembagaan pemerintah daerah, yang meliputi :
- Penyempurnaan fungsi dan struktur kelembagaan pemerintah serta pemantapan tugas dan tanggungjawab aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan;
  - Peningkatan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam pembangunan yang dikaitkan dengan peningkatan kemampuan manajementi pengelolaan.
  - Penyiapan kelembagaan bagi terselenggaranya kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha;
  - Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk menangani pembangunan pada masing-masing WP dan hirarki kota-kota
- Pemantapan sistem informasi guna mendukung efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan pada masing-masing WP dan hirarki kota-kota.
8. Program penataan ruang, pertanahan, dan lingkungan, yang mencakup:
- Pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada masing-masing WP dan hirarki kota sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada;
  - Peningkatan/pengembangan pengelolaan administrasi pertanahan, pemantapan tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan, serta tertib pemeliharaan tanah di masing-masing WP dan hirarki kota, terutama bagi kepentingan pembangunan WP dan kota-kota tersebut
  - Peremajaan wilayah yang termasuk dalam kantong-kantong kemiskinan dan penanganan kawasan kritis;
  - Pembinaan sektor informal dan pengusaha kecil untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan dalam upaya pengentasan kemiskinan di masing-masing WP dan kota.

### **6.3 Operasionalisasi Kebijakan Implementasi Wilayah Pengembangan dan Hirarki Kota-Kota**

Bagian ini akan mengemukakan mengenai aspek-aspek penting yang dapat ditarik dari strategi dan kebijakan implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota yang telah ditetapkan, termasuk mengemukakan langkah-langkah yang perlu segera dilaksanakan sehubungan dengan perkembangan maupun permasalahan yang dialami Kabupaten Subang.

#### **Aspek Penting Strategi dan Kebijakan Pembangunan**

Berdasarkan strategi dan kebijakan implementasi WP dan hirarki kota-kota yang telah ditetapkan di atas, dapat dikemukakan aspek penting yang menjiwai strategi dan kebijakan tersebut sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan dan tuntutan pembangunan.

*Pertama*, Pengembangan WP dan hirarki kota merupakan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengkaitkan kegiatan-kegiatan sektoral termasuk penyediaan dan pengelolaan pembangunan sarana, prasarana, pelayanan, perumahan dan lingkungan termasuk pertanahan. Artinya, penetapan WP dan hirarki kota menyangkut keterpaduan kegiatan multi-sektor.

*Kedua*, Pengembangan WP dan hirarki kota akan terus mengalami transformasi fisik sosial, ekonomi dan budaya. Artinya, pengelolaan pembangunan pada masing-masing Wp dan irarki kota yang diperlukan adalah yang dinamis dan proaktif, yaitu harus memiliki kemampuan dalam mengantisipasi kecenderungan perkembangan dan tuntutan kebutuhan, dapat menangkap peluang yang ada serta mampu mencegah kemungkinan terjadinya dampak negatif.

*Ketiga*, secara ruang, Pengembangan WP dan hirarki kota-kota mempunyai lingkup yang luas. tidak saja dilihat dalam konteks keterkaitan antara kota dan desa, tetapi juga keterkaitan antar kota dalam sistem kota-kota yang lebih luas.

*Keempat*, penanganan implementasi WP dan hirarki kota-kota pada masa yang akan datang tidak saja mencakup aspek perencanaan fisik, tetapi yang menjadi semakin penting adalah manajemen yang terpadu, efisien, efektif. Selain itu, dalam implementasi WP dan hirarki kota bukan lagi didominasi oleh peran pemerintah, sebaliknya peran masyarakat dan dunia usaha akan semakin besar. Dengan demikian, aktor-aktor dari kegiatan pembangunan adalah pemerintah, masyarakat dan swasta yang secara bersama-sama akan membentuk pola pembangunan daerah di masa yang akan datang. Implikasinya, pola

pengelolaan pembangunan di masa yang akan datang merupakan hasil dari negosiasi, mediasi dan advokasi di antara ketiga aktor tersebut. Peran pemerintah sebagai provider akan bergeser menjadi enabler dan regulator untuk meningkatkan peranserta masyarakat dan dunia usaha namun tetap mengusahakan pemerataan dan kelestarian lingkungan. Dengan tuntutan seperti ini, dibutuhkan kualitas sumberdaya manusia di sektor pemerintah, masyarakat dan swasta yang tidak saja lebih baik dari kondisi sekarang, namun juga yang mempunyai keluwesan persepsi tentang perubahan peranan setiap aktor dalam pembangunan. Aparat pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor yang dapat mengambil keputusan akhir, namun harus bersama-sama masyarakat dan swasta. Kesiapan untuk mengubah sikap dan persepsi inilah yang makin diperlukan kelak, jika kita menginginkan pola pengelolaan implementasi WP dan hirarki kota yang lebih produktif efisien dan efektif.

*Kelima*, sebagai konsekuensi dari aspek keempat di atas, desentralisasi dari urusan-urusan yang ditangani pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pengelolaan kegiatan pembangunan daerah yang efisien dan efektif, sehingga Kabupaten Subang dapat meningkatkan daya saingnya dalam menarik investasi.

*Keenam*, implementasi WP dan hirarki kota pada hakekatnya memiliki misi untuk meningkatkan perekonomian wilayah, antara lain melalui peningkatan produktivitas; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dengan demikian, program-program pembangunan yang terkait dengan implementasi WP dan hirarki kota harus direncanakan dan diwujudkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

### **Langkah-langkah Pelaksanaan**

Perkembangan daerah Kabupaten Subang yang relatif pesat dengan segala permasalahan yang dihadapinya menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang mampu mengantisipasi perkembangan sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Berdasarkan kajian sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat ditetapkan beberapa langkah-langkah operasionalisasi strategi implementasi Wp dan hirarki kota-kota antara lain sebagai berikut :

1. Penterpaduan penanganan pembangunan kota dan desa, antara lain dengan mendorong industrialisasi di perdesaan, sehingga sektor industri dan jasa dapat dikembangkan di perdesaan, sebagai alternatif terhadap sektor pertanian. Langkah awalnya adalah

- mengembangkan agroindustri yang akan mendukung pula agrobisnis di perdesaan.
2. Penyusunan rencana-rencana pembangunan sosial-ekonomi dan tata ruang yang lebih operasional pada masing-masing WP dan hirarki kota. Penyusunan rencana tata ruang ini dilakukan baik secara makro yang menempatkan WP dan kota-kota dalam konteks pembangunan Kabupaten Subang, maupun secara mikro yaitu penataan ruang dalam WP dan kota-kota itu sendiri, sebagai acuan program pembangunan secara terpadu dengan program pembangunan wilayah.
  3. Upaya peningkatan pendapatan daerah, yang dititikberatkan pada peningkatan pendapatan dan efisiensi penggunaannya, pengerahan dana masyarakat dan dunia usaha, serta bantuan dan pinjaman daerah.
  4. Penyusunan program kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi WP dan hirarki kota-kota, termasuk perumahan dan infrastruktur. Hal ini didasarkan pada kesadaran terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi peningkatan kebutuhan.
  5. Pemantapan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang terlibat dalam implementasi WP dan hirarki kota-kota serta pola koordinasi antar lembaga tersebut. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi yang makin meningkat kebutuhannya.
  6. Pengembangan pola pengelolaan pertanahan melalui perijinan lokasi, pemberian ijin membangun, perpajakan dan lainnya.
  7. Pengembangan pola pengendalian mutu lingkungan yang merupakan pokok-pokok utama dalam penataan ruang.
  8. Pengembangan pola partisipasi masyarakat.
  9. Pengembangan sistem informasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat serta perencanaan pembangunan.
  10. Program pelatihan/peningkatan keterampilan dan kemampuan masyarakat maupun aparat lembaga-lembaga pengelola.

#### **Indikator Keberhasilan**

Berdasarkan strategi dan program di atas, tingkat keberhasilan pencapaian implementasi WP dan hirarki kota-kota ini dicerminkan melalui berbagai indikator seperti di bawah:

1. Sistem Kegiatan
  - Terciptanya produktivitas tinggi ekonomi pada masing-masing WP dan hirarki kota, dengan indikator seperti tingginya ratio ekspor/impur pada masing-masing

WP dan hirarki kota, tingginya pendapatan per kapita penduduk, tinggi serta kemantapan pertumbuhan ekonomi, rendah serta menurunnya tingkat pengangguran.

- Terciptanya pemerataan serta pengentasan kemiskinan masyarakat, tercermin misalnya dengan indikator-indikator rendahnya jumlah atau proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan, kecilnya perbedaan pendapatan penduduk ekonomi lemah dengan ekonominya kuat;
- Terciptanya kualitas lingkungan pada masing-masing Wp dan hirarki sesuai dengan fungsi, daya dukungnya, kelestarian lingkungan termasuk budayanya tercermin dengan indikator seperti rendahnya tingkat polusi udara, tingginya proporsi kawasan hijau, tingginya tingkat pelestarian gedung/kawasan yang mempunyai nilai sejarah
- Terciptanya pemantapan peran WP dan kota-kota dalam kaitan dengan pembangunan Kabupaten Subang, diwujudkan oleh indikator seperti rendahnya angka kemiskinan di kota-kota pinggiran

## 2. Sistim Jaringan

- Tersedia serta terjangkau infrastruktur dan pelayanan jasa

sosial-ekonomi di masing-masing WP dan hirarki kota untuk masyarakat khususnya golongan lemah, seperti proporsi penduduk khususnya ekonomi lemah yang terlayani air bersih, angkutan umum, fasilitas dan pelayanan kesehatan.

- Tersedianya infrastruktur dan pelayanan jasa sosial-ekonomi cukup kompetitif pada masing-masing WP dan hirarki kota untuk menghadapi persaingan global, misalnya angka sambungan telpon per penduduk.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan implementasi Wilayah Pengembangan dan hirarki kota-kota pada masa mendatang juga dipengaruhi oleh kondisi sistim kelembagaan sebagai sistim penunjang :

- kinerja kelembagaan termasuk kualitas SDM-nya.
- Kondisi sumber dana pembangunan, misal besar PAD serta peran investasi sektor swasta
- tersedianya peraturan yang mendukung implementasi WP dan hirarki kota, misal ketentuan terkait dengan tingkat kemudahan masuknya investasi baru, tingkat kemudahan peran serta pengusaha kecil

Akhirnya pencapaian tujuan untuk mewujudkan implementasi WP dan

hirarki kota-kota pada masa depan juga ditentukan proses manajemen :

- Tercapainya peningkatan dan pemantapan otonomi daerah dalam rangka kemandirian pembangunan wilayah;
- Tercapainya keterpaduan pembangunan, seperti kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, kesesuaian program antar sektor, keterpaduan pembangunan dengan wilayah sekitar;
- Tercapainya peningkatan kemitraan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, hal ini tercermin misalnya dari proporsi investasi swasta, tingginya berbagai kerjasama pelaksanaan serta pengelolaan pembangunan, besarnya peran dunia usaha menengah/ kecil, tidak ada rendahnya angka gejala/ protes dari masyarakat akibat pembangunan.

## 7. PENUTUP

Sebagai akhir dari tulisan ini, akan disampaikan beberapa rekomendasi sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah guna melengkapi hasil kajian ini. Rekomendasi bagi penyempurnaan tulisan ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu rekomendasi bagi pendalaman dan faktor-faktor pendukung yang perlu diikutsertakan. Pendalaman studi ini meliputi penelusuran lebih lanjut terhadap

penyimpangan-penyimpangan dan kelemahan-kelemahan dalam penetapan Wilayah Pengembangan (WP) dan hirarki kota-kota, pencarian strategi-strategi lain diluar strategi yang telah dibahas sebelumnya yang dapat dijadikan strategi pendukung bagi implementasi Wilayah Pengembangan dan hirarki kota-kota Kabupaten Subang. Dengan penelusuran ini akan di dapat strategi-strategi lain yang lebih rinci yang masih termasuk dalam usaha implementasi Wilayah Pengembangan dan hirarki kota-kota Kabupaten Subang, sehingga dengan penelaahan yang lebih rinci akan didapat kesimpulan yang lebih tepat. Adapun pencarian terhadap strategi-strategi lain akan lebih memperluas aspek yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan wilayah.

## 8. DAFTAR PUSTAKA

1. Achmad Djunaedi, *Perencanaan Strategik Untuk Perkotaan : Belajar Dari Pengalaman Negara Lain*, Jurnal PWK – ITB, No.19, 1995.
2. Bintoro Tjokroamidjojo, MA, **“Perencanaan Pembangunan”**, PT. Gunung Agung,
3. BS Kusbiantoro, *Manajemen Strategi Perkotaan*, Jurnal PWK – ITB, No.19, 1995.
4. Dr. Budhy Thahjati S. Soegijoko, *Operasionalisasi Strategi Pembangunan Perkotaan*

- Indonesia*, Jurnal PWK – ITB,  
No.19, 1995.
5. Friedmnn, John, and Mike  
Douglass, *Agropolitan –  
Development : Towards A New  
Strategy For Regional Planning In  
Asia*, Nagoya – Japan, 1975
  6. Hirschman, Alberto. O., *Strategi  
Pembangunan Ekonomi*.  
Terjemahan. Paul Sihotang. PT.  
Dian Rakyat, Jakarta, 1970.
  7. M. Harriadi Asoen, *Pengembangan  
Wilayah*. PWK-UNISBA, 1994.
  8. Nurjana Siti Sutriah, *Pengantar  
Pengembangan Wilayah*,  
Departemen Planologi ITB,  
Bandung, 1983.
  9. Pacione, Michael, *The Geography  
Of The Third Worl Progress And  
Prospect*, London, 1983. .
  10. Sukirno, Sadono, *Beberapa Aspek  
Dalam Persoalan Pembangunan  
Daerah*, FEUI, Jakarta, 1976.
  11. Sukirno, Sadono, *Ekonomi  
Pembangunan, Proses, Masalah,  
dan Dasar Kebijaksanaan*, Borta  
Gorat, Medan, 1981.
  12. ...., Nasional Urban  
Development Strategy (NUDS),  
1985.
  13. ...., Rencana Tata  
Ruang Wilayah (RTRW)  
Kabupaten Subang, 2004.